

**DIPLOMASI MULTI-JALUR INDONESIA KE UNI EROPA UNTUK  
KEBERLANJUTAN EKSPOR KELAPA SAWIT PASCA RED II**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas*

**Oleh:**

**JUAN ARIS ERLANGGA**

**NIM : 2010852023**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini akan menjabarkan upaya diplomasi multijalur Indonesia terhadap keberlanjutan ekspor kelapa sawit setelah Uni Eropa mengeluarkan kebijakan lingkungan RED II yang mendiskriminasi produk CPO Indonesia. UE sebagai importir CPO terbesar urutan ke tiga di dunia setelah India dan Cina tersebut mengeluarkan resolusi minyak kelapa sawit *Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests Renewable Energy Directive II* untuk membatasi penggunaan minyak olahan CPO yang dianggap sebagai produk hasil deforestasi lingkungan, meningkatkan emisi karbon dan gas rumah kaca, juga potensi perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung atau *Indirect Land Use Change* yang tinggi. Minyak CPO juga dianggap UE sebagai produk olahan yang tidak berkelanjutan, hal ini tentunya menimbulkan perlawanan dari negara-negara produsen kelapa sawit karena tuduhan UE tentang CPO yang tidak berkelanjutan dianggap diskriminatif dan tidak berdasar. UE sendiri memiliki pengolahan minyak nabati seperti minyak biji bunga matahari, minyak kedelai, dan minyak kanola yang lebih tidak berkelanjutan daripada minyak kelapa sawit. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan konsep Diplomasi Multijalur yang ditulis oleh Louise Diamond dan John McDonald dalam tulisanya "*The Institute for Multitrack Diplomacy*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Serangkaian strategi diplomasi multijalur yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia diantaranya yaitu mengajukan gugatan sengketa ke WTO dengan negara-negara penghasil kelapa sawit lainnya untuk membantah tuduhan UE terhadap produk CPO, mengeluarkan kebijakan standarisasi pengelolaan lingkungan ISPO, larangan impor nikel dan hilirisasi Industri hingga melakukan kolaborasi dengan aktor non negara seperti pengusaha CPO untuk melakukan promosi kebijakan ISPO yang dapat memperbaiki citra CPO agar dapat diterima oleh UE dan pasaran alternatif negara selain UE..

**Kata Kunci : Uni Eropa, Ekspor, Kelapa sawit, Diplomasi, Proteksionisme, Diskriminasi**



## **ABSTRACT**

*This research will describe Indonesia's multi-track diplomacy efforts towards the sustainability of palm oil exports after the European Union issued the RED II environmental policy which discriminated against Indonesian CPO products. The EU, as the third largest importer of CPO in the world after India and China, issued a palm oil resolution Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests. Renewable Energy Directive II to limit the use of processed CPO oil which is considered a product of environmental deforestation, increasing carbon and greenhouse gas emissions, as well as the high potential for indirect land use changes. The EU also considers CPO oil to be an unsustainable processed product, this issue definitely raises resistance from palm oil producing countries because the EU's accusations about CPO being unsustainable are considered discriminatory and unfounded. The EU itself has processed vegetable oils such as sunflower seed oil, soybean oil and canola oil which are more unsustainable than palm oil. This research will be analyzed using the concept of Multi-track Diplomacy written by Louise Diamond and John McDonald in their article "The Institute for Multitrack Diplomacy. This research uses qualitative methods using secondary data. A series of multi-track diplomacy strategies carried out by the Indonesian government include filing a dispute lawsuit with other palm oil producing countries at the WTO to refute EU accusations regarding CPO products, promoting ISPO environmental management standardization policies, banning nickel imports and industrial downstreaming, lastly collaborating with non-states actors including CPO entrepreneurs to promote ISPO policies which could improve the bad image of CPO so it can be accepted by the EU and the alternative markets countries other than the EU.*

**Keywords : European Union, Exports, Palm Oil, Diplomacy, Protectionism, Discrimination**

